



PERTAHANKAN OPINI WTP 17 KALI BERTURUT-TURUT

Pemkot Fokus Aspek Kualitas dan Kemanfaatan Anggaran

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menyatakan pencapaian ini merupakan motivasi besar bagi seluruh jajaran Pemkot dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi pemerintah. "Kami ingat betul apa yang pernah disampaikan oleh BPK, BPKP maupun Kementerian Keuangan bahwa jangnan hanya fokus pada kuantitas

tetapi bagaimana kualitas itu yang dikejar. Makanya aspek kualitas dan kemanfaatan anggaran untuk masyarakat ini yang akan kami kedepankan," ungkapnya usai menerima LHP LKPD Kota Yogyakarta TA 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (1/4).

Capaian ini menjadi momen bersejarah karena Pemkot Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat tersebut selama 17 kali berturut-turut. Namun, Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam angka statistik semata.

"Capaian WTP ke-17 ini bukan sekadar aspek kuantitatif, melainkan kualitasnya. Setiap rupiah yang dikelola bukan hanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi wajib memberikan manfaat maksimal

bagi masyarakat," imbuhnya. Ia mencontohkan, dalam setiap proyek fisik, kesesuaian spesifikasi dan administrasi adalah

kewajiban dasar. Namun, hasil akhirnya harus berkualitas tinggi dan benar-benar fungsional bagi publik.



KRI-Ardhi Wardan
Penyerahan LHP LKPD Kota Yogyakarta TA 2025 oleh BPK RI Perwakilan DIY kepada Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Oleh karena itu dirinya pun mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh BPK terkait sejumlah catatan dan rekomendasi. Hasto menjamin tanpa menunggu waktu 60 hari, dirinya akan menindaklanjuti setiap catatan tersebut dengan berkoordinasi dengan DPRD Kota Yogyakarta.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan DIY Agustini Sugihartatik, memastikan bahwa proses audit telah dilakukan secara ketat sesuai standar profesionalitas tim auditor. Meski memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemkot Yogyakarta, Agustini tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.

Catatan tersebut bersifat administratif dan tidak mempengaruhi raihan opini WTP. Di antaranya berkaitan pengelolaan barang per-

sediaan di DPUPKP, cadangan beras di Jogiatama Vishesha, aset pertanahan hingga penghitungan penyusutan yang belum akurat. "Kami juga mengapresiasi kinerja DPRD Kota Yogyakarta yang aktif dalam mengawal transparansi anggaran," tandas Agustini.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat, menyambut baik hasil ini. Ia berharap sinergi antara BPK, eksekutif, dan legislatif terus terjaga untuk menjaga marwah penggunaan anggaran negara.

"Kami memastikan akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan BPK terkait rekomendasi yang diberikan. Tujuannya satu, agar setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kemashlahatan masyarakat Yogyakarta," pungkas Sinarbiyat. **(Dhi-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005